

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik China dan Indonesia memang mempunyai sejarah yang kaya dan kompleks, ditandai dengan pergeseran ideologi, dinamika geopolitik, dan perubahan politik dalam negeri kedua negara. Awal terjalinnya hubungan diplomatik antara China dan Indonesia pada tahun 1950, pada masa kepemimpinan Soekarno di Indonesia serta Mao Zedong di China, didorong oleh kesamaan ideologi komunis.¹ Keselarasan ini membuahkan masa hubungan yang erat antara kedua negara, saling mendukung dalam berbagai forum internasional seperti *Asia-Africa Conference* (AAC) tahun 1955 di Bandung. Dukungan Indonesia terhadap partisipasi China dalam *Asia-Africa Conference* (AAC) sangatlah penting karena hal ini menandakan keluarnya tatanan internasional tradisional yang didominasi Barat dan memperkuat pendirian Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok.²

Namun, hubungan tersebut mengalami kemunduran yang signifikan selama era Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, ketika unsur-unsur Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba menjalankan kudeta atas pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan tindakan keras terhadap komunis dan elemen sayap kiri di Indonesia, yang mengakibatkan terputusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan China. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto, yang muncul setelah kudeta, mengambil sikap yang lebih pro-Barat dan menjauhkan diri dari pengaruh komunis.³

Pembangunan kembali hubungan diplomatik antara China dan Indonesia pada tahun 1990 menandakan babak baru dalam hubungan bilateral kedua

¹ Kwartanada, D. (2020). The Making Of The “Chinese Problem”: Indonesian Local Agencies’ Perceptions Of Ethnic Chinese And Communist China, 1950-1979. *Lembaran Sejarah*, 16(2), 183-205.

² Permana, S. A., & Purwantiningsih, A. (2021). Chinese Community Under The Soekarno Era In Indonesia. *Paramita Historical Studies Journal*, 31(1), 104-110.

³ Kusumawardhana, I. (2023). Diplomasi Triangular China Terhadap Indonesia Dalam Mengantisipasi Dilema Malaka Melalui Belt Road Initiative. *Thejournalish: Social And Government*, 4(2), 173-189.

negara. Penerapan politik luar negeri yang “free and active” di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hubungan diplomatik, termasuk dengan China.⁴ Pergeseran kebijakan ini mencerminkan keinginan Indonesia untuk menerapkan pendekatan yang lebih seimbang dalam hubungan internasional, tidak hanya berpihak pada blok Barat atau Timur.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan China memang mengalami kemajuan signifikan selama bertahun-tahun, yang berpuncak pada terjalinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013. Kemitraan ini mencerminkan semakin mendalamnya kerja sama dan kepentingan bersama kedua negara di berbagai sektor. Salah satu faktor pendorong utama di balik penguatan hubungan bilateral adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan China.⁵ Kedua negara telah muncul sebagai pemain utama dalam perekonomian global, dengan tingkat pertumbuhan PDB yang kuat dan perluasan kelas menengah. Dinamisme perekonomian ini menciptakan daya tarik yang kuat bagi peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan pertukaran budaya diantara Indonesia serta China.⁶ Perdagangan antara Indonesia serta China telah berkembang, dan China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Hubungan ekonomi kedua negara ditandai dengan upaya peningkatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, manufaktur, pertanian, dan teknologi.

Berdasarkan laporan China Morning Post oleh Siqui (2022), pada tahun 2021, perdagangan bilateral diantara Indonesia serta China tumbuh sejumlah 58,6% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi US\$124,4 miliar.⁷ China merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun terakhir, dengan sumber daya mineral, bijih logam, serta baja menjadi komoditas utama yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Fajar, P. (2021). *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Pada Sektor Ekonomi (2014-2019)* (Doctoral Dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

⁶ Nugraha, R. S., & Astri, P. M. (2023). Perjanjian Kerjasama Bilateral Antara Indonesia Dan China Dalam Prespektif Pembangunan Infrastruktur Negara. *Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul)*, 4(2), 1-16.

⁷ Siqui, J., & Siqui, J. (2022, July 27). *China-Indonesia Trade: How Important Is It, And What Are The Main Exports?* South China Morning Post. <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3186660/china-indonesia-trade-how-important-it-and-what-are-main>

diekspor Indonesia ke China. China melakukan pengimporan sejumlah 67 juta ton batu bara dari Indonesia pada paruh pertama tahun 2022, sejumlah US\$7,96 miliar, menjadikannya komoditas impor terbesar. China juga membeli 2,3 juta ton feronikel dari Indonesia pada paruh pertama tahun 2022, yang merupakan 91% dari impor feronikel China secara menyeluruh. Indonesia ialah tujuan investasi China terbesar kedua di ASEAN. Pada tahun 2021, investasi langsung non-keuangan China di Indonesia sejumlah US\$1,86 miliar, naik 1,5% YoY. Bidang utama investasi China di Indonesia ialah pertambangan serta metalurgi, pertanian, listrik, real estate, peralatan rumah tangga dan elektronik, hingga ekonomi digital.⁸

Indonesia secara aktif mencari investasi China dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ambisius, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh nusantara. Selain itu, baik Indonesia maupun China telah berkomitmen untuk memajukan liberalisasi ekonomi guna memfasilitasi akses terhadap pasar masing-masing.⁹ Upaya-upaya seperti mengurangi hambatan perdagangan, menyederhanakan prosedur bea cukai, dan mendorong perlindungan investasi sudah telaksana guna penciptaan kekondusifan lingkungan teruntuk perdagangan bilateral dan arus investasi. Terlebih lagi, meningkatnya arus lalu lintas manusia diantara Indonesia dan China memerlukan pengelolaan serta kerja sama yang efektif diantara kedua negara. Hal ini mencakup inisiatif untuk meningkatkan pertukaran antar masyarakat melalui program budaya, kemitraan pendidikan, dan promosi pariwisata. Pertukaran tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga berkontribusi pada saling pengertian serta persahabatan diantara masyarakat Indonesia dan China.¹⁰

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerja sama ekonomi diantara Indonesia dan China mencapai puncaknya di berbagai sektor. Kunjungan Presiden Joko Widodo menghasilkan tonggak penting dengan pernyataan bersama

⁸ Ibid.

⁹ Putri, S. Y., & Maâ, D. (2019). Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia Cina Di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Lemhannas Ri*, 7(1), 15-24.

¹⁰ Munatama, A., & Zhaidah, K. (2023). Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China Dan Indonesia Dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo. *Jurnal Artefak*, 10(1), 77-88.

Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua pemerintah.¹¹ Kemitraan ini semakin diperkuat melalui penandatanganan delapan dokumen kerja sama, yang menguraikan bidang-bidang utama kolaborasi:

- 1) *Memorandum of Understanding (MoU)* Kerja Sama Ekonomi antara Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China.
- 2) *Memorandum of Understanding (MoU)* Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China dan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.
- 3) *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Menteri Badan Usaha Milik Negara RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
- 4) *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional RI (BASARNAS) dan Menteri Perhubungan China.
- 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan China untuk mencegah pajak berganda.
- 6) *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) Indonesia dan Badan Antariksa Nasional China.

Bersamaan dengan tujuan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo, kedua pemerintah menjalankan kesepakatan kerja sama bilateral untuk menyinergikan konsep Poros Maritim Dunia dan inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad 21 (21st Century Maritime Silk Road). Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas maritim melalui pembangunan infrastruktur di kawasan. Dukungan keuangan China yang signifikan mencakup kredit pembeli preferensial sejumlah USD 1,8 miliar, dengan komitmen pinjaman tambahan sejumlah USD 4 miliar. Salah satu proyek andalan kerja sama ini adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung

¹¹ Putri, S. Y., & Maâ, D. (2019). Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia Cina Di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Lemhannas Ri*, 7(1), 15-24.

(High Speed Railway/HSR) yang diresmikan oleh BUMN Indonesia dan China. Pembangunan High Speed Railway/HSR dimulai pada awal tahun 2016 dan selesai pada kuartal pertama tahun 2019 (Putri, & Maâ, 2019).¹² Kerjasama BUMN kedua negara difasilitasi melalui anak perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Konsorsium BUMN Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), bersama China Railway International Co. Ltd., memelopori proyek tersebut. Khususnya, Indonesia mengelola aspek konstruksi, rel kereta api, dan persinyalan, sementara China menyediakan sarana perkeretaapian. Dengan 75% dari total investasi sejumlah USD 5,5 miliar dibiayai oleh China Development Bank (CDB), serta sisanya didukung modal dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), kemitraan ini menunjukkan betapa dalamnya kerja sama ekonomi antara Indonesia dan China serta membawa manfaat bersama dan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.¹³

Selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu 2014-2024, kolaborasi antara Indonesia dan China telah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Indonesia. Khususnya, keterlibatan China dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, sangatlah signifikan. Proyek ini, yang merupakan bagian dari Belt Road Initiative (BRI) China, merupakan contoh kerja sama yang semakin erat antara kedua negara.¹⁴ Dalam hal perdagangan dan investasi, China telah menjadi salah satu tujuan investasi utama Indonesia di ASEAN, dengan investasi mencapai USD 8,2 miliar pada tahun 2022. Terlebih lagi, pasar Indonesia telah menyaksikan lonjakan produk digital dari perusahaan China seperti Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo, serta Huawei. Kolaborasi antara perusahaan China dan Indonesia telah menghasilkan pengembangan aplikasi-aplikasi populer, yang mencerminkan semakin besarnya integrasi kedua perekonomian.¹⁵

Melalui sudut pandang geopolitik, Belt Road Initiative (BRI) adanya kemungkinan China guna membentuk serta memberikan pengaruh kepada

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Susanto, D. (2022). Belt Road Initiative (Bri) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jueb: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 82-89.

lanskap ekonomi serta dinamika regional di seluruh negara peserta. Secara ekonomi, inisiatif ini mempunyai potensi untuk membentuk kembali peta perdagangan serta investasi global dengan peningkatan konektivitas antara China serta negara-negara mitra.¹⁶ Upaya memfasilitasi peningkatan arus barang, jasa, dan investasi, Belt Road Initiative (BRI) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong integrasi ekonomi global yang lebih dalam. Meskipun memiliki potensi manfaat, Belt Road Initiative (BRI) juga menghadirkan berbagai tantangan. Kekhawatiran telah dikemukakan oleh beberapa negara mengenai beban utang yang terkait dengan proyek-proyek Belt Road Initiative (BRI), yang dapat menyebabkan komplikasi keuangan dan politik.¹⁷ Selain itu, proyek-proyek BRI tertentu menghadapi tantangan dan kontroversi lokal karena isu-isu terkait lingkungan, sosial, dan korupsi. Hal ini menggarisbawahi sifat Belt Road Initiative (BRI) yang memiliki banyak segi, yang tidak hanya sekedar pertimbangan ekonomi namun juga mencakup dimensi politik dan sosial yang signifikan.¹⁸

Pada bidang pembangunan infrastruktur, keterlibatan China mencakup jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi. Khususnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menonjol sebagai upaya unggulan dalam kerangka Belt Road Initiative (BRI), yang menunjukkan hasil nyata dari kerja sama bilateral. Pergeseran strategis dalam pendekatan Belt Road Initiative (BRI) China yang memprioritaskan proyek-proyek “small-but-beautiful” mencerminkan respons pragmatis terhadap tantangan ekonomi global, penyesuaian ekonomi dalam negeri, dan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat.¹⁹ Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan citra China secara global dan menghilangkan kekhawatiran mengenai perannya sebagai pemberi pinjaman. Indonesia telah menjadi penerima manfaat yang signifikan

¹⁶ Lalisang, A., & Candra, D. S. (2020). Indonesia's Global Maritime Fulcrum & China's Belt And Road Initiative. Friedrich-Ebert-Stiftung. Retrieved February, 13, 2021.

¹⁷ Nugraha, R. S., & Astri, P. M. (2023). Perjanjian Kerjasama Bilateral Antara Indonesia Dan China Dalam Prespektif Pembangunan Infrastruktur Negara. *Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul)*, 4(2), 1-16.

¹⁸ Tritto, A. (2020). Contentious Embeddedness: Chinese State Capital And The Belt And Road Initiative In Indonesia. *Made In China Journal*, 5(1), 182-187.

¹⁹ Yu, H. (2024). Belt And Road Initiative 2.0 In The Making: How Far Can It Go?. In *Understanding China's Belt And Road Initiative* (Pp. 169-192). Singapore: Springer Nature Singapore.

dari investasi Belt Road Initiative (BRI), dengan kontribusi besar terhadap pembiayaan proyek-proyek utama seperti kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara dan investasi pada aset mineral penting.²⁰

Kerjasama Indonesia dan China selama periode 2014-2024 telah berperan penting dalam mendorong upaya pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Belt Road Initiative (BRI) telah berperan sebagai katalis untuk kerja sama ini, memfasilitasi investasi besar dan transfer pengetahuan dari China untuk mendukung tujuan pembangunan infrastruktur Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang ini penelitian ini akan meneliti terkait “Strategi Perjanjian Kerjasama Indonesia dan China Dilihat dalam Prespektif Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Indonesia Periode tahun 2016-2024.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana efektivitas strategi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia selama periode 2016-2024?
- 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan China untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia selama periode 2016-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah:

- 1) Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas strategi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia selama periode 2016-2024.
- 2) Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan China untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia selama periode 2016-2024.

²⁰ Gong, X. (2019). The Belt & Road Initiative And China’s Influence In Southeast Asia. *The Pacific Review*, 32(4), 635-665.

1.4. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan baru serta pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan China dalam konteks pembangunan infrastruktur. Dengan menganalisis strategi perjanjian kerjasama antara kedua negara, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika politik, ekonomi, serta sosial yang mempengaruhi kerjasama infrastruktur antara kedua negara.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga teruntuk pengambil kebijakan, praktisi, serta pemangku kepentingan terkait dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kedua negara. Dengan memahami lebih baik strategi perjanjian kerjasama yang telah ada dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman periode 2016-2024, para pemangku kepentingan bisa melakukan pengidentifikasi-an akan peluang serta tantangan yang mungkin muncul dalam kerjasama infrastruktur di masa depan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Selain itu, bab ini juga akan memperkenalkan secara singkat tentang strategi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan China dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia selama periode 2016-2024.

Bab II: Kajian Pustaka

Pada bab ini, akan disajikan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini akan mencakup teori-teori yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi, kerjasama internasional, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, akan

dibahas juga studi-studi terdahulu yang telah dilakukan mengenai kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan China serta hasil-hasil yang telah diperoleh.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Penjelasan mengenai pemilihan sampel, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan juga akan disajikan secara detail dalam bab ini.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, akan disajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil ini akan meliputi temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan yang mendalam mengenai implikasi hasil penelitian terhadap kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan China. Bab ini juga akan mencakup perbandingan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang telah dibahas pada bab kajian pustaka.

Bab V: Kesimpulan

Bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini akan merangkum temuan utama dari penelitian, menyoroti kontribusi penelitian terhadap pengetahuan dan praktik, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya dalam konteks kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan China. Selain itu, bab ini juga dapat mencakup saran-saran untuk kebijakan serta implikasi lebih lanjut yang dapat diambil dari penelitian ini.